



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : balitbang.bulelengkab.go.id, Email : balitbang@bulelengkab.go.id
S I N G A R A J A

Singaraja, 7 Agustus 2023

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
di –
tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ 715 /VIII/Bid.3/BPPID/2023

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami kirimkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Kajian/ Penelitian Kelitbangan Tahun 2022 Kabupaten Buleleng, untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2023, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan
2. Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan
3. Yang bersangkutan, untuk diketahui.
(Dinas Perhubungan Kab. Buleleng, Dinas Pariwisata Kab. Buleleng, Dinas Tenaga Kerja Kab. Buleleng, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buleleng, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng, Dinas PUTR Kab. Buleleng, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

**LAPORAN : MONITORING DAN EVALUASI HASIL KAJIAN/PENELITIAN KELITBANGAN TAHUN 2022
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN : MEI, JUNI, JULI 2023**

NO	TANGGAL MONEV/ PERANGKAT DAERAH	JUDUL KAJIAN/PENELITIAN	REKOMENDASI KAJIAN	HASIL MONITORING DAN EVALUASI
1.	Senin, 22 Mei 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	Efektifitas Rencana Rancang Bangun Aplikasi Elektronik Manajemen Aset Penerangan Jalan Umum (e-MAP)	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebaiknya melakukan inventarisasi beberapa pihak ketiga yang menyediakan layanan <i>Smart</i> PJU, sehingga bisa dipastikan biaya awal yang dibutuhkan untuk pengadaan e-MAP, serta menyusun <i>rule system</i> nya agar dapat dipertahankan efektifitas sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan. 2) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebaiknya segera melakukan dan memvalidasi total asset PJU yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Apabila ditemukan lampu PJU yang bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai dengan amanat Permenhub Nomor 27 Tahun 2018 tentang Lampu Penerangan Jalan, maka sebaiknya segera dilakukan usulan mutasi asset lampu PJU kepada pihak terkait sehingga sesuaikan dengan kewenangan yang akan berdampak pada efisensi tagihan listrik lampu PJU. 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebaiknya melakukan koordinasi berkaitan dengan ketersediaan anggaran penggantian lampu sehingga keluhan masyarakat berkaitan dengan lampu PJU yang mati bisa dilakukan segera. 4) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebaiknya melakukan <i>study komparasi</i> kepada beberapa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : surat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 400.12.2.5/403/V/Bid.3/BPPID/2023 tanggal 22 Mei 2023, perihal Monitoring dan Evaluasi Penerapan hasil kajian kelitbangan tahun 2022. - Tim Monev diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Putra Adnyana, SE.M.Si., dengan judul kajian Efektifitas Rancang Bangun Aplikasi Elektronik Manajemen Aset Penerangan Jalan Umum (e-MAP) di Kabupaten Buleleng. - e-MAP merupakan system pengelolaan manajemen asset PJU, yang diyakini akan memberikan fleksibilitas dalam hal manajemen asset lampu PJU di Kabupaten Buleleng termasuk dalam hal pemantauan dan pengamanan aset lampu PJU. - Dari rekomendasi yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan telah melaksanakan inventarisasi terhadap pihak ketiga yang menyediakan layanan <i>Smart</i> PJU yang bertujuan untuk mengetahui biaya awal yang dibutuhkan untuk pengadaan e-MAP. - Dari segi efisiensi biaya secara tidak langsung sudah termasuk didalamnya mempertimbangkan dari sisi aspek kesehatan dan keselamatan kerja dari SDM yang semestinya melakukan monitoring di lapangan, namun dipermudah melalui system, termasuk juga dalam efisiensi jumlah personil yang terlibat sehingga e-MAP ini bisa diterapkan di Kabupaten Buleleng, yang selama ini telah melakukan study banding ke Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. - Rencana pengadaan aplikasi system aplikasi PJU akan disesuaikan dengan kondisi keuangan dari Pemerintah

			<p>pemerintah daerah yang sudah menerapkan pengelolaan lampu PJU berbasis <i>Smart system</i> lampu PJU termasuk kebutuhan biaya pemeliharaan system termasuk modal awal yang dibutuhkan untuk pengadaan system.</p>	<p>Kabupaten Buleleng termasuk juga biaya detail pemeliharaan system.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program e-MAP yang telah dibuat dalam bentuk kajian oleh Balitbang Inovda Buleleng bersama tenaga ahli nantinya agar dapat difasilitasi kepada tim anggaran pemerintah kabupaten Buleleng.
2.	<p>Senin, 22 Mei 2023 Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng</p>	<p>Pengembangan Model Desa Agrowisata Berbasis Tri Hita Karana Pada Desa Sambangan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng</p>	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 9 Mei sampai dengan 6 Agustus 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha dan STAHN Mpu Kuturan Singaraja dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian ini menggunakan pendekatan utama studi dokumentasi terhadap profil desa dan rencana pembangunan jangka menengah pada ketiga desa, serta uji lapangan berupa uji track maka direkomendasikan Model Pengembangan Agrosubak dan Agroventure. Video hasil uji track dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi digital paket Agrowisata dan Agrosubak begitu pula dengan mapping potensi terkini pada Desa Sambangan, Desa Panji dan Baktiseraga dapat dipakai sebagai bahan pembuatan infografis (peta). 2) Optimalisasi pengembangan pariwisata berkonsep agro dan berbasis <i>Tri Hita Karana</i> perlu dilakukan studi lanjutan yakni Studi Kelayakan yang selanjutnya menyusun DED (<i>detail engineering design</i>). Maka, direkomendasi untuk penyusunan Keputusan Bupati, Peraturan Kades dan Peraturan Bersama Kades, sehingga pengembangan agrowisata di Desa Sambangan dan sekitarnya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat secara proporsional, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. 3) Kolaborasi antara pertanian dengan pariwisata tentu membutuhkan kesepakatan serta kesepahaman bersama, mengingat ada banyak konsep yang dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi di terima oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.Si., dua usulan kajian tahun 2022 oleh Dinas Pariwisata adalah Rekonstruksi Model Desa Wisata Tradisional Balinese Life Pada Desa Bali Aga di Kabupaten Buleleng dan Pengembangan Model Desa Agrowisata Berbasis Tri Hita Karana pada Desa Sambangan dan Sekitarnya di kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan podcast oleh Kepala Dinas Pariwisata tentang kajian desa wisata di Kabupaten Buleleng. - Menurut kepala dinas, berdasarkan studi lapangan dan dokumentasi, didapatkan faktor strategis internal dan eksternal diantaranya luas lahan, jenis pertanian, iklim yang memadai, akses yang baik, dukungan pemerintah baik daerah maupun desa yang tertuang dalam RPMJ desa, kesiapan sumber daya manusia, tend pariwisata alam yang semakin berkembang, serta tersedianya mitra yang mendukung kegiatan pariwisata di Desa Sambangan dan sekitarnya. - Melalui analisa kekuatan serta peluang yang ada, terdapat dua model agrowisata berbasis <i>Tri Hita Karana</i> yang dapat dikembangkan di Desa Sambangan dan sekitarnya yakni (1). Agrosubak Desa Sambangan dan sekitarnya dan (2). Agroventure Desa Sambangan dan sekitarnya. - Terkiat Kajian Pengembangan Desa Berbasis <i>Tri Hita Karana</i> akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait

			<p>dikembangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, serta fasilitas baik pra-sarana dan sarana yang telah ada. Pengembangan desa agrowisata berbasis <i>Tri Hita Karana</i> memerlukan pemahaman sumber daya manusia, pemertahanan lahan pertanian dan perkebunan serta memberdayakan jenis tanaman khas Desa Sambangan dan sekitarnya. Maka dari itu, direkomendasi kajian pengembangan pertanian dengan melibatkan peran subak.</p> <p>4) Selanjutnya rekomendasi untuk dinas terkait Pengembangan Model Desa Agrowisata Berbasis <i>Tri Hita Karana</i> Pada Desa Sambangan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng dapat dipaparkan sebagai berikut;</p> <p>(1) Dinas Pariwisata untuk selanjutnya memetakan kegiatan terkait Pengembangan Desa Agrowisata Berbasis <i>Tri Hita Karana</i> Pada Desa Sambangan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng, diantaranya pelatihan penyiapan produk wisata berbahan hasil pertanian, pelatihan kependudukan agrowisata, menyiapkan daftar sarana dan prasarana pendukung agrowisata yang dibutuhkan, MoU antara Dinas Pariwisata dengan ketiga desa terkait.</p> <p>(2) Dinas Pertanian untuk selanjutnya memetakan kegiatan terkait Pengembangan Desa Agrowisata Berbasis <i>Tri Hita Karana</i> Pada Desa Sambangan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng, diantaranya penyuluhan terkait potensi agrowisata, pelatihan perawatan pertanian berbahan organik.</p> <p>(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya memetakan kegiatan terkait Pengembangan Desa</p>	<p>sarana dan prasarana pendukung agrowisata, MOU dengan ketiga desa terkiat di Desa Sambangan, penyuluhan potensi agrowisata, pelatihan perawatan pertanian berbahan organik serta penyusunan rencana aksi perbaikan akses dan sarana penunjang agrowisata pada ketiga desa tersebut. Kolaborasi antara pertanian dengan agrowisata menurut kepala dinas membutuhkan kesepakatan serta kesepahaman bersama sehingga pengembangan desa agrowisata berbasis <i>Tri Hita Karana</i> memerlukan pemahaman sumberdaya manusia dalam bidang pertanian, perkebunan serta pengembangan jenis tanaman hias sehingga untuk kedepannya akan melakukan koordinasi dan melibatkan peran subak yang ada di Desa Sambangan sekitarnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Kajian Model Desa Wisata Tradisional Balines Life pada Desa Bali Age, menurut Kepala Dinas pada kawasan SCTPB memiliki potensi yang sangat besar dalam wisata berbasis budaya karena desa-desa tersebut memiliki keyakinan berkaitan dengan kesamaan logat bahasa, keyakinan animisme dan dinamisme, rumah tradisional, kerajinan tradisional, seni tradisional, perpaduan alam yang eksotis sehingga model desa wisata kawasan Bali Age dapat dijadikan kawasan model desa wisata tradisional. - Dengan adanya destinasi wisata maka para wisatawan yang mengunjungi kawasan SCTPB tidak akan menghilangkan roh masyarakat Bali age sebagai masyarakat tradisional, namun akan menjadikan perekat persatuan masyarakat SCTPB dan memperkuat adat dan tradisi yang telah terbangun. - Dari rekomendasi dua kajian Dinas Pariwisata pada bulan Juli 2023 akan melaksanakan festival desa wisata Bali Aga di tempat wisata Lovina
--	--	--	---	---

			<p>Agrowisata Berbasis <i>Tri Hita Karana</i> Pada Desa Sambangan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng, diantaranya memetakan akses bermasalah, menyusun rencana aksi perbaikan akses dan sarana penunjang agrowisata pada ketiga desa tersebut.</p>	
		<p>Rekonstruksi Model Desa Wisata Tradisional Balinese Life Pada Desa Bali Aga di Kabupaten Buleleng</p>	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 12 Juli sampai dengan 9 Oktober 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Bagi masyarakat kawasan SCTPB hendaknya semakin meningkatkan kapasitas diri untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kawasan SCTPB untuk menunjang keasrian kawasan SCTPB. Bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Dinas Pariwisata hendaknya membentuk organisasi formal pengelola desa wisata kawasan Bali Aga yang bertanggungjawab terhadap semua aktivitas wisata di wilayah SCTPB yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (Akta Pendirian, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Melaksanakan festival desa wisata Bali Aga dengan pusat kegiatan di Daerah Cempaga dengan menampilkan budaya Bali Aga, seperti kerajinan tradisional, makanan tradisional, rumah tradisional, kesenian tradisional, dan budaya tradisional. (2). Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hendaknya melakukan restorasi rumah tradisional yang ada di kawasan SCTPB sebagai bentuk pelestarian tradisi dan budaya. Membuat <i>central</i> pakir di daerah Cempaga dengan fasilitas pendukung rumah pajang 	

			kerajinan, rumah contoh, restoran, kamar mandi dan peta paket kegiatan wisata di kawasan Bali Aga.	
3.	Selasa 13 Juni 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Efektifitas dan Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng Pada Sektor Ketenagakerjaan di Masa Pandemi dan Endemi Covid-19	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 1 April sampai dengan 1 Juli 2023 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil tenaga kerja dan pengangguran di Kabupaten Buleleng terkonsentrasi (jumlahnya melebihi 70%) tingkat Pendidikan sebagian besar SD s/d SMA sederajat dan pada kelompok umur produktif/ Muda. Disisi lain yakni sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali sangat rentan akan berbagai peristiwa sehingga perlu penyiapan lapangan kerja, kebijakan, strategi rasional dan relevan dengan kondisi tersebut seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi potensi lokal Kabupaten Buleleng untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja lokal. Menumbuhkan keyakinan potensial sumber ekonomi di luar pariwisata seperti pertanian, peternakan, Perikanan serta potensi lainnya. Mengurangi Ketergantungan Tenaga kerja pada sektor pariwisata serta mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal. b. Pemerintah melalui dinas terkait perlu meningkatkan kegiatan, kebijakan dan strategi untuk dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dengan lebih mengutamakan penggalian potensi daerah. c. Mengintensifkan potensi UMKM di Buleleng untuk tenaga kerja lokal supaya potensi ketenagakerjaan di sektor ini tidak banyak direbut oleh tenaga kerja luar Buleleng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Monev diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, dengan judul kajian Efektifitas dan Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng Pada Sektor Ketenagakerjaan di Masa Pandemi dan Endemi Covid-19. Kajian yang dilaksanakan dari hasil rekomendasi telah dilaksanakan dengan melakukan pelatihan kepada UMKM dan masyarakat pasca covid-19. - Optimalisasi potensi lokal Kabupaten Buleleng untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja lokal. - Menumbuhkan keyakinan potensial sumber ekonomi di luar pariwisata seperti pertanian, peternakan, Perikanan serta potensi lainnya. - Mengurangi Ketergantungan Tenaga kerja pada sektor pariwisata serta mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal, dari rekomendasi tersebut telah dibuatkan Job fire/bursa lowongan kerja di Kabupaten Buleleng. - Pemerintah melalui dinas terkait perlu meningkatkan kegiatan, kebijakan dan strategi untuk dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dengan lebih mengutamakan penggalian potensi daerah, rekomendasi telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memfasiliatsi peluang usaha agar bisa mandiri. - Mengintensifkan potensi UMKM di Buleleng untuk tenaga kerja lokal supaya potensi ketenagakerjaan di sektor ini tidak banyak direbut oleh tenaga kerja luar Buleleng, rekomendasi yang dilakukan dengan melakukan bursa latihan kerja bagi UMKM yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalibukbuk Buleleng.

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none">2. Berbagai kegiatan/kebijakan/strategi yang dilakukan dinas ketenagakerjaan sudah efektif namun perlu ditingkatkan kearah sangat efektif, kondisi ini dikarenakan sebenarnya angka indeks efektivitas senilai 81 termasuk dalam kategori efektif namun termasuk rentang yang paling rendah dalam kategori efektif. Perlu dijadikan bahan kajian untuk meningkatkan kebijakan dan stsrategi di masa yang akan datang terutama keyakinan akan dimensi efektivitas bukti langsung terkait materi serta profesionalisme penyelenggaraan dan dimensi efektivitas jaminan akan kebermanfaatan kebijakan dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan di masa ketidakpastian (pandemi <i>Covid 19</i>).3. Kebijakan terkait jaminan Ketenagakerjaan (TK dan kesehatan) sebenarnya sudah efektif hanya perlu penyempurnaan regulasi untuk memaksimalkan peran di masa yang akan datang.4. Komunikasi efektif dimasa ketidakpastian sangat diperlukan, disarankan untuk menyiapkan/menyempurnakan pola komunikasi efektif yang dapat menjembatani berbagai informasi yang dibutuhkan berbagai pihak baik pemerintah, pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat umum. Ketepatan informasi yang dapat diserap publik akan dapat meredam dan meminimalkan dampak negatif dari kondisi ketidakpastian (seperti pandemi <i>Covid 19</i>).5. Pendataan ketenagakerjaan supaya valid, masing-masing pihak terkait bisa menggunakan data awal dari sumber yang sama. Sinergi dari berbagai pihak khususnya Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Institusi lainnya harus dioptimalkan dengan keterkaitan Bersama Badan Pusat Statistik. Pemanfaatan kemajuan teknologi khusus sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menghasilkan kependudukan khusus data | |
|--|--|--|---|--|

			ketenagakerjaan.	
4.	Selasa, 13 Juni 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	Merekonstruksi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 16 Desember 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>(1). Bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Dinas Pendidikan, mesti memberikan akses jaringan internet yang lebih besar pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng, menyediakan tim teknologi informasi pada beberapa sekolah yang kekurangan tim teknologi informasinya, menyediakan fasilitas komputer atau laptop bagi beberapa sekolah dan menyediakan pelatihan pada guru-guru yang belum memiliki keterampilan menggunakan pembelajaran yang bersifat sinkronus dan asinkronus, melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah dalam melaksanakan pembelajaran digital.</p> <p>(2). Bagi guru, sebaiknya senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi, pengembangan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran digital.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Monev diterima oleh Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buleleng, adapun kajian yang dilaksanakan tahun 2022 adalah Merekonstruksi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan. - Beberapa rekomendasi yang dilaksanakan pada kajian tersebut Pihaknya mengakui telah melakukan beberapa tahap dan koordinasi penerapan sistem pendidikan dengan Digitalisasi Satuan Pendidikan. Memang ini sudah menjadi program strategis Dinas Pendidikan kedepan dengan penerapan digitalisasi pendidikan di Kabupaten Buleleng. - Dalam penerapan Digitalisasi Pendidikan, pihaknya juga akan merencanakan untuk melakukan Literasi digitalisasi, kerjasama dengan Dinas Kominfo, dan Jurnalis Buleleng sehingga anak-anak siswa semakin bijak menggunakan media sosial sekaligus memahami jurnalistik sebagai bagian dari masyarakat informasi yang cerdas.
5.	Rabu, 14 Juni 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	<p>Kajian Naskah Akademik ini dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober 12 Desember 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Panji Sakti Singaraja, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>Kepada Pemerintah Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera mengusulkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas P4GN beserta 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi diterima oleh Kabid Pengembangan Nilai nilai Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Buleleng Nyoman Widiartami SH.MAP, dengan judul kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

		Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika	<p>Drafft Ranperda kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan.</p> <p>2. Segera mempersiapkan sarana prasarana dalam Fasilitas P4GN di daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil kajian Naskah Akademik Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika-P4GN menilai dengan kajian ini diharapkan akan menghasilkan perda P4GN yang mampu menekan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. - Dari rancangan Perda sudah hampir rampung untuk kemudian dikoordinasikan kebagian Hukum Pemkab Buleleng, selanjutnya dilakukan harmonisasi di propinsi Bali. - Dengan kondisi kasus Narkotika di kabupaten Buleleng, tanpa menyebutkan jumlah penyalahgunaan narkotika di Buleleng masih sangat memperhatikan. Sehingga pihak Kesbangpol sebagai leading sektor, kerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng, Polres dan Kejaksaan secara rutin terus melakukan sosialisasi baik dikalangan kampus maupun di pedesaan.
6.	Rabu, 14 Juni 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 14 Desember 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>(1) Berdasarkan kondisi nyata terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan muatan utama dari disusunnya naskah akademis ini maka sudah saatnya segera dilakukan upaya untuk merekondisi hal-hal tersebut, dengan menyatukan persepsi semua pemangku kepentingan yaitu Bupati Buleleng, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng untuk mengaktualisasikan pola pikir dan pola tindak dengan lebih sinergis sehingga pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara terpadu dapat benar-benar dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pengesahan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat meningkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi di terima oleh Kabid Pendataan dan Pelayanan Ayu Sri Susantianni, SE. M.AP. dengan judul kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - BPKPD Kabupaten Buleleng menyampaikan apresiasi terhadap kajian Naskah Akademik ini, hanya saja diakuinya masih belum mengakomodasi harapan yang ingin dicapai oleh BPKPD Kabupaten Buleleng, masih banyak yang perlu disempurnakan, banyak hal-hal substansial yang tidak terakomodasi hasil kajian ini. - Oleh karena itu pihaknya kembali melakukan FGD baik dengan perangkat daerah, Kemenkumham, maupun pihak menteri dalam negeri sehingga hasil kajian sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang ada

			<p>kinerja, kreatifitas dan pengaplikasian sehingga terbangun dan terbina pemikiran inovatif dalam mengembangkan potensi di Kabupaten Buleleng di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menjaga stabilitas produksi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bidang perekonomian di Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Seperti misalnya, kajian detail terhadap besaran angka retribusi maupun pajak yang nanti diberlakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rancangan perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini sudah selesai, hanya menunggu harmonisasi dari kemenkumham dan Gubernur Bali. Karena pentingnya Perda ini, hingga Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana memberikan atensi agar bisa selesai dan diterapkan pada tahun 2024. Kalau Perda ini belum selesai maka Pemkab Buleleng tidak ada dasar untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi di tahun 2024, yang berdampak kepada PAD kabupaten Buleleng. - Oleh karena itu kerja ekstra ketat untuk menyelesaikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah ini. Ia mengharapkan terhadap kajian kajian yang dilakukan, agar lebih detail dan memasukkan usulan-usulan yang dikehendaki baik oleh Perangkat Daerah Pengusul maupun yang terkait, sehingga hasilnya bisa tepat sasaran.
7.	Kamis, 13 Juli 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Tata Cara Pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Buleleng	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Udayana Denpasar, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya retribusi hasil dari analisis pada setiap kategori kelas, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2) Alur pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng memiliki sedikit perbedaan dengan daerah lain. Sampah dari sumbu er akan dibawa menuju ke TPS3R dan dikelola oleh Bumdes dan Lembaga Swadaya Persampahan. Selanjutnya DLH Kabupaten Buleleng akan melakukan pengelolaan dari TPS3R menuju ke TPA. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Monev dan podcast dihadiri oleh Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kabid Intek Made Mira Tri Yulia Justisiana, ST. M.AP. didampingi Analis Ahli Muda Drs. Made Roy Astika, Gede Suardika, SE. M.Pd., Made Sumbertiasih, SE. MM., dan pelaksana Made Arya Mertada. Adapun judul kajian yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah Tata Cara Pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Buleleng. - Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng diwakili Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Bahaya dan Racun, Ketut Santiana, SP., menyatakan pemungutan dan besaran Retribusi Pengelolaan persampahan/ kebersihan di Kabupaten Buleleng selama ini sudah berlangsung dengan baik bahkan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Lebih jauh diungkapkan, terhadap pemungutan Retribusi Pengelolaan Sampah selama ini telah dilakukan dengan sistim

			<p>penambahan jumlah kontainer mobile, untuk menampung 30% residu sampah hasil dari TPS3R yang kemudian dikelola oleh pihak DLH Kabupaten Buleleng.</p> <p>3) Tata cara pemungutan retribusi persampahan/kebersihan yang dominan diinginkan oleh masyarakat Buleleng adalah melalui Bumdes dan swadaya persampahan, seperti yang berlangsung selama ini. Kolaborasi Bumdes dan swadaya persampahan dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan penerimaan retribusi persampahan yang berkelanjutan.</p>	<p>kerjasama dengan pihak swasta, bank sampah unit di desa/kelurahan atau kecamatan, dengan besaran sesuai dengan tarif dari TPS ke TPA. Sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 17 tahun 2011. Dengan Perda ini tidak menemui kendala bahkan selalu mencapai target.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkaitan dengan hasil kajian Kelitbangan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dari Universitas Udayana tentang tata cara pungutan retribusi Sampah, yang telah menghasilkan rekomendasi, ternyata masih banyak belum mengakomodasi substansi sesuai keinginan pihak DLH. Diakunya hasil kajian merekomendasikan agar tata cara dan pemungutan menggunakan klasifikasi masyarakat dengan kategori atau klas miskin, klas bawah menengah, dan masyarakat klas, dan diakunya dengan sistim ini justru tidak efektif dan sulit untuk penerapannya. - Rekomendasi dari hasil kajian, belum bisa ditindak lanjuti karena; <ul style="list-style-type: none"> • Dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang pelayanan persampahan/kebersihan kajian tersebut mengalami penurunan tarif retribusi sedangkan biaya operasional penanganan sampah lebih. • Sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan hasil kajian belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng seperti jembatan timbang di TPA Bengkala yang fungsinya untuk menimbang sampah. • Pengukuran pengenaan tarif retribusi perkategori sumber yaitu rumah tangga miskin, menengah dan atas akan sulit untuk dilaksanakan. - Hasil rekomendasi belum dituangkan dalam program/kegiatan, karena kajian ini belum sesuai dengan usulan dari lingkungan hidup untuk mendukung perubahan Perda tentang retribusi.
--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil kajian ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Sulitnya melaksanakan pemungutan retribusi dengan hasil analisis pada setiap kategori kelas • Anggaran untuk menyediakan container mobile belum ada • Belum mempunyai jembatan timbang sampah di TPA Bengkala - Hasil kajian yang sudah dihasilkan ini cukup sebagai bahan pengetahuan saja dalam penerapan pemungutan Retribusi Sampah, tidak untuk diterapkan. Kami lebih efektif menggunakan kajian sebelumnya yang sudah ada, meski diakui sudah memberikan masukan yang detail terhadap arah kajian kepada tenaga dalam setiap FGD maupun pembahasan secara detail.
8.	Senin, 17 Juli 2023 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Pengembangan Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 16 Desember 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>(1) Bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, hendaknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan keterampilan penggunaan teknologi informasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil. 2. Melakukan pelatihan dan pendampingan untuk membuat profil usaha mikro dan kecil, melakukan promosi dan penjualan secara <i>online</i> dan melakukan pengemasan produk usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng. <p>(2) Proses-proses ini diyakini akan menjadikan usaha mikro dan menengah semakin Tangguh serta dikenal luas oleh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Buleleng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, yang diterima oleh Kabid Perindustrian (I Gede Agus Wiswa Diatmika, ST.) dan Pengawas Koperasi (Hadi Setiadi, S.Sos). - Pada Kajian Pengembangan Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng sesuai rekomendasi adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Hasil kajian telah ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan kepada UMKM dalam penggunaan teknologi informasi kepada pelaku usaha, melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam persyaratan perijinan usaha kecil dan menengah, PIRT, ijin edar secara online. Dari rekomendasi yang dihasilkan nantinya terbit Nomor Ijin Berusaha (NIB). • Bentuk tindaklanjut pengembangan kebijakan digitalisasi dengan memanfaatkan gedung PLUT untuk memajang hasil-hasil UMKM, koordinasi dengan Dinas Perijinan, fasilitasi ke desa-desa untuk NIB (Nomor Ijin Berusaha). • Hasil rekomendasi juga telah dituangkan dalam program kegiatan yang ada di dinas dan jikalau pun kekurangan anggaran melakukan koordinasi dengan propinsi maupun

				<p>pusat/kementerian dalam bentuk DAK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada usaha kecil dan menengah di tiap kecamatan dalam hal digitalisasi dalam usaha yang dilaksanakan dan juga melakukan kolaborasi dengan pihak terkait, misalnya perusahaan besar memberikan pelatihan/keterampilan kepada UMKM dan hasilnya dibeli oleh perusahaan yang diajak kerjasama. • Selaku leading sector dalam kajian ini telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perijinan, Balai POM, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kominfo, Kadin dan juga lembaga-lembaga pusat yang menangani digitalisasi perindustrian. • Kendala yang dihadapi adalah banyaknya UMKM yang belum memiliki SDM yang memadai (melek digitalisasi) sehingga perlu dilakukan persiapan SDM UMKM dan perlunya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi.
		<p>Analisis Potensi Pengembangan Industri di Kabupaten Buleleng</p>	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>(1) Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang tersedia di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar, bertalian dengan itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng hendaknya membuat kebijakan pengembangan industri di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar sesuai dengan rencana tindak lanjut dan potensi yang ada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Kajian Analisis Potensi Pengembangan Industri di Kabupaten Buleleng, seperti dalam hasil rekomendasi kajian dimana ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia, dimana pemerintah Kabupaten Buleleng hendaknya membuat kebijakan pengembangan Industri di Kabupaten Buleleng sesuai dengan rencana tindak lanjut dan potensi yang ada. - Dari hasil Monev kajian tersebut adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dilaksanakan pelatihan UMKM dalam peningkatan sumberdaya manusia bidang perdagangan dan mengikuti pameran UMKM baik di Kabupaten maupun propinsi. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga tujuan pengembangan industri di Kabupaten Buleleng dapat meningkat, sehingga peran UMKM sangat diharapkan untuk pengembangannya. • Hasil rekomendasi telah dimasukkan dalam program/kegiatan APBD maupun dana propinsi dan dana

				<p>pusat (DAK), dalam pelaksanaan kegiatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Perijinan Satu Pintu dalam pembuatan ijin sentra-sentra usaha seperti pembuatan handycraft di Desa Sidetapa Kec. Banjar, sentra kain endek dan sentra usaha mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengujian usaha makanan juga telah melakukan kerjasama dengan Balai POM dalam pemeriksaan Uji Lab bahan makanan yang bebas dari bahan beracun yang nantinya sebagai syarat dan pengeluaran sertifikasi halal. • Kendala yang dihadapi dalam tindak lanjut hasil kajian adalah keterbatasan tenaga kapasitas sumberdaya pembina.
9.	Kamis, 20 Juli 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	Kajian Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten Buleleng	<p>Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Agustus 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Udayana Denpasar, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>(1) Untuk menindaklanjuti hasil kajian penyelenggaraan sistem drainase perkotaan Kabupaten Buleleng perlu dibuatkan payung hukum sebagai pedoman dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Buleleng dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Buleleng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang diterima oleh Kepala Dinas Ir. Putu Eka Putra, ST.MM.IPU., dan Kabid Cipta Karya Gede Suharjono, ST.MT. di ruang Kepala Dinas. - Kajian tahun 2022 yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng dengan judul Kajian Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten Buleleng. - Dari hasil rekomendasi kajian telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan operasional dan pemeliharaan saluran drainase. Tahun 2023 telah dimasukkan program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase, dengan kegiatan operasional dan pemeliharaan drainase. - Kota Singaraja boleh dikategorikan daerah rawan banjir, karena setiap kali musim penghujan beberapa sudut kota Singaraja selalu mengalami banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menilai meski rawan banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah antisipasi dengan armada yang dimiliki. Setidaknya banjir yang ada di kota Singaraja tidak memakan waktu sampai 24 jam, hanya beberapa jam saja. - Dengan hasil kajian Kelitbang yang telah memberikan

				<p>rekomendasi, pihaknya segera akan melakukan pembaharuan sistem drainase di kota Singaraja melalui pendekatan kearifan lokal yang secara turun menurun dimiliki oleh daerah Bali. Diakuinya dengan melakukan pendekatan kearifan lokal dan melestarikan telajakan, tebe, serta fungsi subak yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang didampingi Kabid Cipta Karya Gede Suharjono, ST. MT. juga mengungkapkan, segera akan merealisasikan hasil kajian Kelitbang untuk perbaikan sistem drainase dengan menyusun perencanaan dan pendataan permasalahan drainase di Buleleng, dengan terlebih dulu menyusun Perda sebagai payung hukum dalam penerapannya. Selama ini diakuinya, segala permasalahan yang menyangkut drainase termasuk munculnya banjir di beberapa sudut kota, selalu yang menjadi sasaran masyarakat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, padahal masyarakat tidak tahu kalau ada tingkatan kewenangan baik daerah, propinsi maupun Pusat. Namun demikian pihak Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang selalu menangani dengan cepat, sehingga bisa diatasi dengan baik. - Selain itu mengacu hasil rekomendasi kajian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah melakukan analisa dibuatnya sumur resapan di setiap rumah tangga, untuk menyerap air hujan. Oleh karena itu pihaknya mengharapkan agar keterlibatan masyarakat dan para pengusaha terutama pengembang di Buleleng semakin ditingkatkan, sehingga sistem drainase ini berjalan dengan baik. Perlu kesadaran masyarakat tidak membuang sampah di saluran air atau sungai, bagi pengembang untuk tidak menghilangkan telajakan atau tebe sebagai fungsi subak yang efektif dalam pengelolaan saluran air.
10.	Kamis, 20 Juli 2023 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Buleleng	Kajian ini dilaksanakan dari tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Agustus 2022 (3 bulan), bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil kajian Balitbang tahun 2022 adalah Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Buleleng. Dari hasil monitoring dan evaluasi Balitbang Inovda saat ini belum merevisi Roadmap SIDa 2017, dimana kita masih menunggu

	Kabupaten Buleleng		<ol style="list-style-type: none"> 1). Kabupaten Buleleng merevisi roadmap SIDa 2017 dengan mempertimbangkan hasil kajian ini. Beberapa perangkat Daerah dapat meneruskan target yang dipandang masih relevan untuk dikejar sampai 5 tahun kedepan sedangkan beberapa PD harus melakukan revisi ulang target SIDa dalam roadmap yang akan disusun tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini dan masukan-masukan dari responden. 2) Kabupaten Buleleng disarankan untuk membuat satu aplikasi untuk menginventarisasi data inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng. 3) Balitbanginovda membantu mengidentifikasi inovasi apa saja yang bisa dikembangkan untuk bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan memberikan PAD bagi Kabupaten Buleleng 4) Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban dan dengan adanya kewajiban membuat laporan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) maka inovasi yang dilaksanakan PD sangat penting untuk meningkatkan nilai IKM. 5) Kabupaten Buleleng perlu membuat desa percontohan untuk pengembangan inovasi yang bisa memotivasi desa-desa lain untuk mengembangkan hal yang sama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Buleleng. 6) Kabupaten Buleleng menyediakan dana pendamping dan kemudian bekerjasama dengan perguruan tinggi di Bali untuk bisa mengakses pendanaan-pendanaan yang ada di level nasional dan internasional. 7) Pemda Kabupaten Buleleng membentuk Tim penyusun proposal untuk bisa membantu mengakses pendanaan dari pemerintah pusat maupun dari bantuan luar negeri. Skema-skema 	<p>perubahan nomenklatur dari Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng agar dalam penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan ini nantinya sesuai dengan nomenklatur yang baru, karena saat disusunnya Kajian Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ini masih mengacu pada Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor : 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dimana setelah kajian ini terselesaikan barulah rencana melaksanakan penelitian/penyusunan Roadmap SIDa. Namun, dengan adanya regulasi terbaru yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah pada pasal 5 disebutkan bahwa BRIDA melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PerBRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah pada pasal 27 (2) disebutkan bahwa Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota disusun oleh BRIDA kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di dalam Ketentuan Penutup Pasal 54 disebutkan bahwa Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484) yang saat ini menjadi kewenangan BRIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Sehingga dengan demikian, kegiatan penyusunan Roadmap SIDa akan beralih menjadi Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Disamping itu juga belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait penyusunan Rencana Induk dan Peta
--	--------------------	--	--	--

			<p>pendanaan yang ada dapat dilihat kembali pada bab 5.</p>	<p>Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seperti Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri yang telah disebutkan diatas, sehingga kita belum mengetahui secara pasti sejauh mana tingkat relevansi dari Kajian SIDA yang telah disusun tahun lalu tersebut. Oleh sebab itu, kita menunggu baik instruksi dari Pemerintah Pusat, Pemprov serta pucuk pimpinan Pemkab Buleleng dalam hal Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang nantinya dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka menginventarisasi data inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng Balitbang Inovda telah membuat suatu inovasi yaitu Aplikasi SI INDAH (Sistem Informasi Inovasi Daerah) Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nomor 87 tahun 2023 pada tanggal 25 Januari 2023. Sistem Aplikasi ini memuat database inovasi daerah Kabupaten Buleleng, dimana Admin telah mengunggah data inovasi daerah Kabupaten Buleleng dari tahun 2020 hingga tahun 2023 ini sesuai data inovasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Buleleng. Para inovator juga bebas bisa mengunggah data inovasinya ke sistem aplikasi ini yaitu melalui link : http://siindah.bulelengkab.go.id, dimana nantinya setelah proses upload data di sistem data akan diverifikasi lebih lanjut agar memenuhi kriteria/indikator inovasi daerah. - Balitbang Inovda telah mengidentifikasi inovasi yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga kita hanya tinggal memilah-milah/mengelompokkan saja inovasi yang telah ada dan jika belum ada kita sudah mensosialisasikannya pula kepada masyarakat. Contoh : Inovasi yang berdampak pada ekonomi yang lebih luas adalah : Inovasi di bidang perdagangan misal untuk inovasi terkait pengembangan terhadap pelaku usaha (digitalisasi marketing produk UMKM, inovasi terkait metode produksi, manajemen hasil produksi); Inovasi di bidang pertanian (inovasi untuk pengembangan hasil produksi pertanian, TTG, inovasi teknik
--	--	--	---	--

				<p>pemasaran dll); Inovasi di bidang Pariwisata (inovasi metode pengembangan obyek pariwisata, kawasan percontohan/rule model, teknik marketing).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balitbang Inovda juga telah mengidentifikasi inovasi yang bisa untuk meningkatkan PAD Kabupaten. Inovasi telah ada dan akan terus berupaya dikembangkan untuk lebih memaksimalkan peningkatan PAD kita. Contoh : Inovasi terkait pengelolaan retribusi, Inovasi terkait pengelolaan pajak (reklame, PBB, Pajak pribadi, BPHTB). - Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban dan dengan adanya kewajiban membuat laporan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) maka inovasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah sangat penting untuk meningkatkan nilai IKM, sebab semakin banyak inovasi Perangkat Daerah, maka semakin meningkat terhadap kualitas pelayanan publik, maka seluruh Perangkat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan publiknya melalui pengembangan/inovasi.
--	--	--	--	--

Singaraja, 7 Agustus 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara